



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
UNIT KERJA : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MUKTI**
2. Jabatan : **KEPALA BADAN**
3. NHK : **733297**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **4.802.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1.000 m²/600 m² di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 1.072.000.000
2. Tanah Seluas 6.300 m² di KAB / KOTA MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp. 1.055.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1.000 m²/500 m² di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 1.575.000.000
4. Tanah Seluas 1.883 m² di KAB / KOTA MERANGIN, Rp. 172.000.000
5. Tanah Seluas 13.968 m² di KAB / KOTA MERANGIN, Rp. 152.000.000
6. Tanah Seluas 14.008 m² di KAB / KOTA MERANGIN, Rp. 147.000.000
7. Tanah Seluas 19.970 m² di KAB / KOTA MERANGIN, Rp. 230.000.000
8. Tanah Seluas 12.960 m² di KAB / KOTA MERANGIN, HASIL SENDIRI Rp. 122.000.000
9. Tanah Seluas 10.430 m² di KAB / KOTA MERANGIN, HASIL SENDIRI Rp. 112.000.000
10. Tanah Seluas 20.049 m² di KAB / KOTA MERANGIN, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 574.000.000

1. MOBIL, MITSUBISI SPORT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOBIL, TOYOTA LAND CRUISER PRADO TXL 2.7 A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ---

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 205.206.105

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 5.581.206.105

III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 5.581.206.105

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.